



PERILAKU TIDAK ETIS PEJABAT DAN KRISIS LEGITIMASI POLITIK INDONESIA 2025

Fajar Cahyati, Heridadi, Adi Subiyanto, Wilopo

Manajemen Bencana, Fakultas Keamanan Nasional,

Universitas Pertahanan Republik Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi faktor penyebab gejolak politik Indonesia 2025, mengevaluasi respons pemerintah, dan menganalisis dampak perilaku tidak etis para pejabat terhadap stabilitas demokrasi. Metode penelitian kualitatif meliputi studi dokumen kebijakan, tinjauan media. Hasil menunjukkan bahwa 12 gelombang demonstrasi besar sepanjang 2025 dipicu oleh banyaknya kebijakan kontroversial yang dicanangkan seperti kenaikan PPN, larangan LPG 3 kg, dan hingga skandal etika pejabat, termasuk korupsi masif dan tunjangan berlebihan DPR di tengah sulitnya ekonomi. Mekanisme moral disengagement memungkinkan pejabat merasionalisasi tindakan tidak etis tersebut, sementara kepemimpinan etis yang lemah dan tekanan mencapai target memperburuk budaya birokrasi. Respons pemerintah cenderung reaktif dimana jika viral terlebih dulu, baru cabut kemudian. Hal ini justru memperdalam krisis legitimasi. Perwujudan stabilitas demokrasi hanya dapat diperkuat melalui reformasi tata kelola, seperti penerapan kepemimpinan etis, penegakan akuntabilitas, dan peningkatan transparansi dalam proses pembuatan kebijakan. Pendekatan ini diharapkan memulihkan kepercayaan publik dan mencegah terulangnya konflik politik serupa atau lebih parah di masa mendatang.

Kata Kunci: Perilaku Tidak Etis, Moral Disengagement, Krisis Legitimasi, Gejolak Politik.

PENDAHULUAN

Pada tahun 2025 Indonesia mengalami gejolak politik yang sangat signifikan, hal ini ditandai dengan gelombang demonstrasi besar-besaran

yang berujung pada kerusuhan di berbagai wilayah nusantara. Fenomena ini mencerminkan akumulasi ketidakpuasan masyarakat yang telah mencapai titik kritis terhadap berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan.

*Correspondence Address : fajar.cahyati@gmail.com
DOI : 10.31604/jips.v12i11.2025. 4336-4342
© 2025UM-Tapsel Press

Berdasarkan data komprehensif yang dirilis CNBC Indonesia (2025), sepanjang tahun 2025 tercatat setidaknya 12 gelombang demonstrasi besar dengan tema dan tuntutan yang beragam, mulai dari aksi "Indonesia Gelap" pada Februari hingga kerusuhan masif Agustus-September yang mengguncang stabilitas politik nasional.

Gelombang protes merupakan puncak dari berbagai kebijakan kontroversial pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada kepentingan rakyat, kemudian perilaku tidak etis para pejabat yang semakin menggerus kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi. Akademisi UIN Walisongo, Kholidul Adib, mengidentifikasi setidaknya delapan kebijakan kontroversial yang menjadi pemicu dari gelombang protes di berbagai wilayah pada tahun 2025, meliputi kenaikan PPN menjadi 12%, larangan penjualan LPG 3kg di warung, pembekuan rekening bank menganggur oleh PPATK, hingga berbagai kebijakan yang dinilai mencekik daya beli masyarakat (Suara Jawa Tengah, 2025). Pola kebijakan kontroversial dan kemudian dibatalkan setelah mendapat kritik publik yang dikenal sebagai fenomena "viral dulu, cabut kemudian" telah menciptakan ketidakpercayaan sistematis masyarakat terhadap kapabilitas pemerintah dalam mengelola negara (BBC Indonesia, 2025).

Hak penyampaian pendapat yang semula dimulai sebagai bentuk aspirasi demokratis yang sah berubah menjadi kerusuhan masif dan provokatif, puncaknya setelah tragedi tewasnya seorang pengemudi ojek *online* bernama Affan Kurniawan yang ditabrak kendaraan taktis Brimob pada 28 Agustus 2025. Peristiwa ini menjadi katalisator protes damai menjadi gelombang kekerasan dan kerusuhan yang meluas ke berbagai kota seperti Jakarta, Bandung, Makassar, Surabaya. Pembakaran gedung-gedung pemerintah

dan fasilitas publik. Data dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) yang dikutip dalam analisis Kompasiana (2025) mencatat lebih dari 3.000 orang ditangkap, 1.042 orang mengalami luka-luka, dan beberapa orang dilaporkan hilang selama periode kerusuhan tersebut.

Eskalasi konflik ini dapat dijelaskan melalui teori *moral disengagement*, yang dijelaskan oleh Lian et al., 2020). Teori ini menyatakan bahwa individu dapat membenarkan atau menghilangkan rasa bersalah untuk tindakan tidak etis, termasuk dalam konteks politik. Dalam hal ini, pelaku baik pejabat maupun aparat keamanan membenarkan ketimpangan kebijakan dan tindakan represif sebagai langkah untuk menjaga stabilitas. Di sisi lain, perilaku tidak etis pejabat menjadi salah satu faktor kunci lain yang memperparah gejolak politik ini. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Moore et al., kepemimpinan etis memiliki peran penting dalam membentuk moral kognisi karyawan serta mengurangi kemungkinan terjadinya pelanggaran etika dalam organisasi (Moore et al., 2019). Ini menunjukkan bahwa jika para pemimpin di pemerintahan Indonesia menunjukkan kepemimpinan yang etis, maka akan ada dampak positif terhadap perilaku anggota masyarakat dan pejabat publik dan berlaku sebaliknya. Fenomena ini diperkuat oleh berbagai kasus konkret seperti kontroversi tunjangan rumah DPR sebesar Rp 50 juta per bulan di tengah kondisi ekonomi yang sulit, yang menciptakan kesenjangan mencolok.

Teori tentang kepemimpinan tidak etis, juga ditelaah oleh Hassan et al., memberikan kerangka untuk memahami bagaimana perilaku pemimpin dapat mempengaruhi etika di lingkungan mereka (Hassan et al., 2022). Pemimpin yang menunjukkan perilaku tidak etis dapat menciptakan iklim etika yang

buruk di organisasi, yang bisa menjalar ke seluruh tingkatan lembaga pemerintah. Kemudian (Harahap et al., 2023) menjelaskan bahwa elit politik memiliki pengaruh besar dalam pembentukan kebijakan dan dinamika politik. Ketika elit politik terlibat dalam praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, publik pun akan kehilangan kepercayaan terhadap institusi politik, yang berujung pada krisis legitimasi (Harahap et al., 2023).

Aspek penting lain yang berkaitan dengan krisis legitimasi adalah performa partai politik. Kurniawan dan Handayani (2022) menegaskan bahwa optimalisasi peran partai politik sangat penting untuk menegaskan legitimasi demokrasi (Kurniawan & Handayani, 2022). Jika partai politik tidak dapat berfungsi secara efektif sebagai penghubung antara rakyat dan pemerintah, akan muncul ketidakpuasan yang dapat mengarah pada apatisme politik.

Ketidakstabilan politik yang terjadi saat ini di Indonesia merupakan kombinasi kebijakan ekonomi yang merugikan rakyat kecil, perilaku elit politik yang tidak responsif dan terkesan *tone deaf*, kemudian respons represif aparat terhadap kritik publik.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akar permasalahan dan dampak gejolak politik yang terjadi di Indonesia sepanjang tahun 2025, dengan fokus khusus pada dinamika hubungan antara kebijakan pemerintah, perilaku tidak etis pejabat, dan respons masyarakat, dimana kebijakan-kebijakan kontroversial yang dikeluarkan pemerintah telah mempengaruhi legitimasi politik dan kepercayaan publik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menganalisis dan mendeskripsikan kebijakan-kebijakan

pemerintah, akar permasalahan dan dampak gejolak politik yang terjadi di Indonesia sepanjang tahun 2025 dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Data diperoleh dari berbagai media massa dan studi dokumen tentang kebijakan pemerintah dan perilaku tidak etis pejabat sebagai pemicu gejolak dan eskalasi konflik sepanjang paruh tahun 2025. Analisis terhadap dokumen-dokumen tersebut dikaitkan dengan teori-teori yang relevan sehingga didapatkan tujuan dari penelitian ini secara komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis mengungkap sejumlah faktor struktural dan kultural yang menjadi pemicu utama gelombang demonstrasi besar di Indonesia sepanjang tahun 2025. Pertama, analisis dokumen kebijakan dan pemberitaan media massa menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi yang kontroversial, termasuk kenaikan PPN dari 11% menjadi 12%, pelarangan penjualan LPG 3 kg di warung, serta pembatalan subsidi listrik 50% yang sebelumnya dijanjikan membebani kelompok menengah ke bawah yang sudah menghadapi tekanan inflasi dan pelemahan daya beli. Ketidakadilan fiskal ini diperparah oleh terkuaknya skandal etika pejabat, seperti kasus korupsi bernilai triliunan rupiah dan tunjangan rumah anggota DPR sebesar Rp 50 juta per bulan di tengah sulitnya kondisi ekonomi rakyat.

Kerangka teori *moral disengagement* menjelaskan bagaimana pejabat publik dan aparat keamanan merasionalisasi tindakan tidak etis mereka. Mulai dari kenaikan tunjangan legislatif digambarkan sebagai kompensasi wajar demi efektivitas tugas, dan penyamaran tindakan represif terhadap demonstran sebagai pengendalian massa untuk menjaga ketertiban umum.

Kegagalan kepemimpinan etis di berbagai level pemerintahan semakin

mengikis kepercayaan publik. Analisis berita menyebutkan fenomena rangkap jabatan pejabat di BUMN dan pola kebijakan “viral dulu, cabut kemudian” sebagai cerminan lemahnya komitmen pemimpin terhadap integritas. Studi Pillay (2014) menekankan bahwa kepemimpinan berintegritas dapat menurunkan tingkat korupsi dan memperkuat kepercayaan publik, namun kondisi di Indonesia 2025 menunjukkan sebaliknya seakan absennya figur yang konsisten menegakkan standar etika memperkuat *moral disengagement* di birokrasi. Buah dari kombinasi kebijakan kontroversial, *moral disengagement*, dan kepemimpinan etis yang lemah menciptakan krisis legitimasi substantif dan prosedural. Legitimasi prosedural terganggu oleh kegagalan kinerja etis pejabat terpilih, sedangkan legitimasi substantif terkikis oleh inkonsistensi kebijakan dan respons reaktif pemerintah yang sering mencabut kebijakan sebelum implementasi. Maraknya gelombang demonstrasi yang memuncak pada kerusuhan Agustus-September setelah tewasnya Affan Kurniawan, menunjukkan saluran partisipasi formal tidak lagi efektif, sehingga masyarakat memilih aksi jalan sebagai medium ekspresi.

Dalam pembahasan ini menegaskan bahwa stabilitas demokrasi Indonesia hanya dapat dipulihkan melalui reformasi tata kelola: penerapan kepemimpinan etis, mekanisme akuntabilitas tegas, dan transparansi penuh dalam perumusan kebijakan. Memperkuat integritas pejabat dan meminimalkan *moral disengagement*, kepercayaan publik diharapkan pulih dan potensi konflik politik serupa dapat dicegah.

Gejolak politik yang melanda Indonesia, teori *moral disengagement* yang dijelaskan oleh Albert Bandura memberikan kerangka analisis yang sangat relevan untuk memahami

bagaimana pejabat publik dapat membenarkan perilaku tidak etis mereka. Teori ini menyatakan bahwa individu dapat membenarkan atau menghilangkan rasa bersalah untuk tindakan tidak etis melalui berbagai mekanisme kognitif, termasuk dalam konteks politik di Indonesia mengkonfirmasi bahwa *moral disengagement* merupakan variabel yang secara ontologis paling dekat dengan perilaku korupsi, dimana individu mengembangkan “*counterfeit self*” yang memungkinkan mereka membenarkan tindakan koruptif berdasarkan pengalaman etis atau tidak etis sebelumnya.

Dalam situasi di mana pejabat publik Indonesia bertindak tidak etis selama 2025, *moral disengagement* dapat menjelaskan bagaimana mereka merasa tidak bersalah atas tindakan yang merugikan masyarakat, karena mereka melihatnya sebagai strategi rasional dalam sistem di mana korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan sudah menjadi hal yang lumrah. Kontroversi tunjangan rumah DPR sebesar Rp 50 juta per bulan di tengah kondisi ekonomi yang sulit merupakan contoh konkret dari *moral disengagement*, dimana para anggota legislatif membenarkan kenaikan tersebut dengan berbagai rasionalisasi, mulai dari hak yang sah hingga kebutuhan untuk menjalankan tugas dengan baik. Tampak jelas dalam cara para pejabat menggambarkan tunjangan tersebut bukan sebagai *privilege* yang berlebihan, melainkan sebagai kompensasi yang layak atau investasi untuk kualitas kerja legislatif.

Tantangan moral kepemimpinan publik menekankan bahwa kepemimpinan etis memiliki peran fundamental dalam membentuk budaya moral dalam organisasi pemerintahan. Kepemimpinan etis tidak hanya tentang mengikuti kode moral tertentu, tetapi juga tentang membuat keputusan sulit

dalam menghadapi ambiguitas dan tekanan dari berbagai pihak dan kegagalan kepemimpinan etis di berbagai level pemerintahan telah menciptakan iklim yang kondusif bagi praktik-praktik tidak etis.

Analisis Pillay (2014) tentang integrity leadership dalam sektor publik Afrika Selatan memberikan perspektif yang sangat relevan dengan kondisi Indonesia. Pillay menekankan bahwa kepemimpinan dengan integritas merupakan kunci untuk memerangi korupsi dan membangun tata kelola pemerintahan yang baik. Ketiadaan figur kepemimpinan yang menunjukkan integritas konsisten telah mengakibatkan erosi kepercayaan publik yang sistematis. Presiden Prabowo sendiri, meskipun memiliki tingkat kepercayaan 88% menurut LSI pada April 2025, tampak terusik dengan riak ketidakpercayaan publik yang tidak dapat dilawan oleh survei yang kredibel secara metodologi (Kumparan, 2025).

Teori tentang kepemimpinan tidak etis yang ditelaah oleh Hassan et al. (2022) memberikan kerangka untuk memahami bagaimana perilaku pemimpin dapat mempengaruhi etika di seluruh tingkatan organisasi pemerintahan. Pemerintahan Indonesia 2025, lemahnya kepemimpinan etis di berbagai level telah menciptakan iklim organisasi yang permisif terhadap pelanggaran etika. Fenomena rangkap jabatan yang melibatkan 2 menteri dan 33 wakil menteri di BUMN, sebagaimana dilaporkan oleh Transparency International Indonesia, merupakan indikator konkret dari lemahnya kepemimpinan etis yang seharusnya memberikan teladan bagi aparatur di bawahnya.

Fenomena skandal etika menunjukkan bahwa KKN bukan semakin berkurang, tetapi justru menggurita dan menjadi bagian dari sistem pemerintahan yang dianggap normal. Hal ini mengkonfirmasi teori

Hassan tentang bagaimana kepemimpinan tidak etis menciptakan budaya organisasi yang permisif terhadap pelanggaran etika. Ketika para pemimpin di level tertinggi menunjukkan perilaku yang dipertanyakan kredibilitasnya, seperti penggunaan kop surat kementerian untuk keperluan pribadi atau perilaku arogan dalam berinteraksi dengan publik, hal ini memberikan sinyal kepada aparatur di bawahnya bahwa standar etika yang berlaku dapat fleksibel atau diabaikan.

Akumulasi dari berbagai faktor di atas telah mengakibatkan krisis legitimasi yang mendalam dalam sistem politik Indonesia. Pengamat sosial politik Yusfitriadi dari Lembaga Studi Visi Nusantara Maju menyatakan bahwa maraknya aksi unjuk rasa menunjukkan adanya krisis legitimasi terhadap pemerintah, baik legislatif maupun eksekutif hingga yudikatif. Survei Indikator Politik Indonesia pada Januari 2025 menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap DPR hanya berada di angka 69%, dan DPR tetap menjadi salah satu lembaga dengan peringkat terendah dalam hal kepercayaan publik (Islami, 2025). Pemerintah gagal dalam menghasilkan kebijakan yang berkualitas, ditambah dengan pola kebijakan yang inkonsisten dan reaktif, telah menggerus legitimasi kebijakan secara sistematis. Fenomena "viral dulu, cabut kemudian" yang menjadi ciri kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran mencerminkan ketiadaan visi jangka panjang dan proses perumusan kebijakan yang matang.

Kombinasi dari faktor-faktor di atas telah menciptakan dampak sistemik yang mengancam stabilitas demokrasi Indonesia. Propublika (2025) dalam analisisnya tentang gagalnya Presiden Prabowo memahami protes rakyat menunjukkan bahwa gelombang protes Agustus 2025 lebih dari sekadar letusan ketidakpuasan, tetapi merupakan

ekspresi kolektif dari kejemuhan atas sistem yang terus-menerus gagal mendengar dan memahami suara dari bawah. Ketika saluran demokrasi formal mandek, dan janji-janji elektoral menjelma menjadi jebakan legitimasi kekuasaan, maka jalanan menjadi satunya ruang politis yang tersisa bagi rakyat.

Rangkaian demonstrasi pada akhir Agustus 2025 turut menandai krisis legitimasi para wakil rakyat, dimana legitimasi bukan lagi penisbahan formal yang diberikan negara kepada individu sebagai pemenang pemilu, melainkan proses pembuktian berkelanjutan kepada publik melalui kinerja dan perilaku yang etis. Ketika proses pembuktian ini gagal dilakukan, maka legitimasi formal kehilangan substansinya dan menjadi sekedar cangkang kosong yang mudah dihancurkan oleh gelombang ketidakpuasan publik.

Fenomena gejolak politik yang terjadi di Indonesia 2025 menunjukkan bahwa demokrasi prosedural saja tidak cukup untuk menjamin stabilitas sistem politik. Demokrasi substansial yang ditandai oleh kepemimpinan yang etis, kebijakan yang berkualitas, dan responsivitas terhadap aspirasi rakyat menjadi prasyarat mutlak bagi keberlanjutan sistem demokratis. Ketika elemen-elemen ini absen, maka yang terjadi adalah apa yang disebutkan sebagai demokrasi semu yang hanya berfungsi sebagai panggung legitimasi kekuasaan tanpa substansi yang nyata bagi kesejahteraan dan keadilan bagi rakyat.

Kondisi ini menunjukkan perlunya reformasi mendasar dalam sistem politik Indonesia, bukan hanya pada level institusional tetapi juga pada level budaya politik dan etika kepemimpinan. Tanpa perubahan fundamental dalam cara para pemimpin memahami tanggung jawab etis mereka

dan dalam sistem yang mendorong akuntabilitas dan transparansi, gejolak politik serupa berpotensi terulang dan bahkan mengancam eksistensi sistem demokrasi itu sendiri. Pengalaman 2025 seharusnya menjadi momentum refleksi mendalam bagi seluruh elemen bangsa untuk membangun kembali fondasi etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

SIMPULAN

Gelombang demonstrasi besar di Indonesia 2025 dipicu oleh ketidakadilan kebijakan ekonomi dan skandal etika pejabat, yang merusak kepercayaan publik. Mekanisme memungkinkan *moral disengagement* pelaku merasionalisasi tindakan tidak etis, sementara tekanan target kinerja dan kegagalan kepemimpinan etis memperparah budaya birokrasi. Kombinasi faktor-faktor ini menimbulkan krisis legitimasi prosedural dan substantif, sehingga saluran partisipasi formal kehilangan efektivitas dan memicu kerusuhan. Stabilitas demokrasi hanya dapat dipulihkan melalui reformasi tata kelola, dengan mengedepankan kepemimpinan etis, penegakan akuntabilitas, dan transparansi kebijakan untuk memulihkan kepercayaan publik dan mencegah konflik politik serupa.

DAFTAR PUSTAKA

BBC Indonesia. (2025, July 20). *Prabowo-Gibran: Potret kebijakan pemerintah-viral dulu, cabut kemudian*. BBC News Indonesia. Diunduh di <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cd0v8g47glvo>

BBC Indonesia. (2025, September 17). *Teka-teki orang hilang dalam demo Agustus 2025*. BBC News Indonesia. Diunduh di <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cj07my805lno>

- CNBC Indonesia. (2025, September 2). *RI dihantam 12 demo besar sepanjang 2025, ini detail tuntutan rakyat*. CNBC Indonesia. Diunduh di <https://www.cnbcindonesia.com/research/2025090211244-128-663534/ri-dihantam-12-demo-besar-sepanjang-2025-ini-detail-tuntutan-rakyat>
- Harahap, M., Nadya, R., Sitanggang, W., & Jamaludin, J. (2023). Elit politik di indonesia: akar dan dampak penyalahgunaan hak berdemokrasi. Comserva Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat, 3(06), 2149-2160. <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i06.1023>
- Hassan, S., Kaur, P., Muchiri, M., Ogbonnaya, C., & Dhir, A. (2022). Unethical leadership: review, synthesis and directions for future research. *Journal of Business Ethics*, 183(2), 511-550. <https://doi.org/10.1007/s10551-022-05081-6>
- Kompas. (2025, September 3). *Legitimasi semu para wakil rakyat*. Kompas. Diunduh di <https://nasional.kompas.com/read/2025/09/04/06450051/legitimasi-semu-para-wakil-rakyat>
- Kumparan. (2025, April 22). Empat legitimasi kekuasaan. Kumparan. <https://kumparan.com/dr-riant-nugroho/empat-legitimasi-kekuasaan-24vXMAWE09E>
- Kurniawan, F. and Handayani, R. (2022). Masalah pelaksanaan fungsi partai politik dan dampaknya terhadap konsolidasi demokrasi di indonesia. Jurnal Demokrasi Dan Politik Lokal, 4(2), 128-145. <https://doi.org/10.25077/jdpl.4.2.128-145.2022>
- Lian, H., Huai, M., Farh, J., Huang, J., Lee, C., & Chao, M. (2020). Leader unethical pro-organizational behavior and employee unethical conduct: social learning of moral disengagement as a behavioral principle. *Journal of Management*, 48(2), 350-379. <https://doi.org/10.1177/0149206320959699>
- Moore, C., Mayer, D., Chiang, F., Crossley, C., Karlesky, M., & Birtch, T. (2019). Leaders matter morally: the role of ethical leadership in shaping employee moral cognition and misconduct. *Journal of Applied Psychology*, 104(1), 123-145. <https://doi.org/10.1037/apl0000341>
- Pillay, P. (2014). The public sociology of ethics, corruption and public administration: A South African case study. *African Journal of Public Affairs*, 7(2), 53-66. <https://repository.up.ac.za/items/994a0397-1bec-49f4-b660-bd907e6aa393>
- Propublika. (2025, Agustus 31). Gagal paham Prabowo memahami protes rakyat: Tanda krisis legitimasi kekuasaan. Propublika. <https://propublika.id/esai/gagal-paham-prabowo-memahami-protes-rakyat-tanda-krisis-legitimasi-kekuasaan/>
- Suara Jawa Tengah. (2025, September 1). *Bongkar 8 kebijakan kontroversial pemerintah, akademisi UIN sebut ini biang kerok Indonesia membara*. Suara Jawa Tengah. Diunduh di <https://jateng.suara.com/read/2025/09/02/085120/bongkar-8-kebijakan-kontroversial-pemerintah-akademisi-uin-sebut-ini-biang-kerok-indonesia-membara>
- Wahyudi, I. S. (2023). Profit planning in corporate budgeting: The impact of aggressive targets on unethical behavior. *Journal E-Business and Management Science*, 1(1), 66-75. <https://journal.proletargroup.org/index.php/JEBS/article/download/53/31>